

**RENJA
RENCANA KERJA
TAHUN 2020**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas karuniaNya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dapat diselesaikan. Dokumen RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud perencanaan organisasi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2020.

Dengan tersusunnya dokumen ini kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Akhir kata, kami berharap Dokumen RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kepada semua pihak yang telah turut membantu terselesaikannya penyusunan dokumen ini kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara,



Dr. Ir. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19630908 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan.....5

1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 15

BAB III TUJAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH18

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 18

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

4.1. Program dan Kegiatan 23

BAB VIII PENUTUP..... 25

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja OPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renja Perangkat Daerah menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Salah satu cara yang diambil untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam Rapat Kordinasi (Rakor), yang melibatkan pustakawan dan arsiparis Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Disamping menyerap aspirasi dari pendekatan yang diuraikan diatas, juga dengan memperhatikan tuntutan yang muncul pada masyarakat seiring dengan kemajuan dan teknologi informasi dewasa ini.. Hal berikutnya yang dilakukan adalah dengan mengkomparatifkan pencapaian program kegiatan dari Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang dimekarkan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai referensi bagi keputakaan dan kearsipan Kalimantan Utara yang baru dibentuk OPD Baru sesuai Perda Nomor 5 taun 2016.

Pengambilan data-data pada tahun sebelumnya digunakan untuk melihat program dan kegiatan mana saja yang dapat dan belum direalisasikan sehingga perlu untuk diusulkan didalam Renja yang baru.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi sehingga terlihat benang merah

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dengan langkah-langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan didalam Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara disamping sebagai dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan. Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah adalah tahapan permulaan didalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025.
13. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021.
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
24. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

- Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2018 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2019.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2020 dan prakiraan tahun 2021.

3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2020; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD dan uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD 2017-2021 sebagai program strategis yaitu **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** dengan *Indikator Kinerja Program (out come) yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip dengan Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Jumlah OPD yang Mengelola Arsip Secara Baku*. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Budaya Baca.
- b. Meningkatkan Perlindungan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara menurut DPA Tahun 2018 adalah untuk anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4.452.436.377,- dan belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.572.333.565,- sehingga Total Dana APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebesar Rp.

9.024.769.942,-. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.974.229.207,- atau 66,80% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.880.169.214,- atau 84,86%. Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 sebesar 76% dan realisasi fisik sebesar 91,86%.

Berbagai program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2018 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA pada tahun 2018 terdapat 6 program dan 28 Kegiatan yang direncanakan sebagaimana berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 360 lembar terealisasi sebanyak 290 Lembar atau 80,56%. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.416.000,- atau 84,16%.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100 %, kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar RP. 121.500.000,- dengan realisasi sebesar RP. 110.186.564,- atau 90,69%.
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target 3 unit terealisasi sebanyak 3 unit atau 100% kegiatan ini merupakan pembayaran pajak dan perpanjangan masa berlaku STNK serta penggantian nopol kendaraan dinas dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.802.000,- atau 25,35%.
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% kegiatan ini berupa pembayaran honor-honor serta gaji PTT dengan pagu anggaran Rp. 642.500.000,- realisasi sebesar Rp. 462.847.00,- atau 72,04%.
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target 10 Jenis terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100%, pagu anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.188.430,- atau 79,98%.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan target 10 Jenis terealisasi sebanyak 7 jenis atau 70% kegiatan ini mendapat pagu anggaran sebesar RP. 150.000.000,- realisasi sebesar Rp. 134.233.548,- atau 89,49%.

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 10 jenis terealisasi sebanyak 6 jenis atau 60% kegiatan ini berupa penjiilidan dan pencetakan berkas dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi sebesar Rp. 57.897.700,- atau 96,50%.
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 10 jenis terealisasi sebanyak 9 jenis atau 90%, pagu anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.538.000,- atau 50,25%.
9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 10 jenis terealisasi sebanyak 6 jenis atau 60%, pagu anggaran Rp. 596.250.000,- realisasi sebesar Rp. 197.493.780,- atau 33,12%. Dalam kegiatan ini ada penambahan pagu dari anggaran perubahan untuk pengadaan peralatan lab komputer, namun proses lelang yang lama mengakibatkan kegiatan tidak terealisasi.
10. Kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga dengan target 10 jenis terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100% dan pagu anggaran Rp. 23.000.000,- realisasi sebesar Rp. 22.417.700,- atau 97,47%.
11. Kegiatan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 10 jenis terealisasi sebanyak 8 jenis atau 80% kegiatan ini berupa penggandaan koran dan majalah yang diperuntukan untuk aparatur dinas dengan pagu Rp. 40.500.377,- dan realisasi Rp. 40.497.000,- atau 99,99%.
12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan target 1.640 porsi terealisasi sebanyak 1.500 porsi atau 91,46% kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat dan kegiatan dengan pagu Rp. 120.000.000,- realisasi Rp. 119.597.100,- atau 99,66%.
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 60 kali terealisasi sebanyak 60 kali atau 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 589.500.000,- realisasi Rp. 523.703.424,- atau 88,84%.
14. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah dengan target 80 kali terealisasi sebanyak 80 kali atau 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 384.044.000,- realisasi Rp. 383.871.444,- atau 99,96%.
15. Kegiatan penyewaan gedung kantor dengan target 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 196.680.000,- realisasi Rp. 196.680.000,- atau 100%.

16. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor SKPD target 2 kali tahap pembangunan terealisasi sebanyak 1 kali atau 50%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 740.500.000,- realisasi Rp. 107.695.000,- atau 14,54%. Karna keterbatasan waktu, sisa dari target akan dilaksanakan pada tahun 2019 sekaligus dengan pembangunan fisik gedung, hal ini juga menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran target tersebut.
17. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target 3 unit terealisasi sebanyak 3 unit 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 73.000.000,- realisasi Rp. 63.633.915,- atau 87,17%. kegiatan ini berupa jasa service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas.
18. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, target 10 unit terealisasi sebanyak 6 unit atau 60% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.714.500 atau 38,57%.
19. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan target 4 orang terealisasi sebanyak 4 orang atau 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 116.000.000,- realisasi Rp. 103.851.323,- atau 89,53%.
20. Kegiatan rapat koordinasi perpustakaan dan kearsipan se-Kalimantan Utara dengan target 48 orang terealisasi sebanyak 48 orang atau 100%, pagu kegiatan ini sebesar Rp. 93.345.000,- realisasi Rp. 93.345.000,- atau 100%.
21. Kegiatan Pembinaan pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan target 10 perpustakaan terealisasi sebanyak 10 perpustakaan atau 100%, pagu anggaran Rp. 56.980.000,- realisasi Rp. 37.573.000,- atau 65,94%.
22. Kegiatan pengembangan perpustakaan digital dengan target 1 aplikasi terealisasi sebanyak 1 aplikasi atau 100%, pagu kegiatan Rp. 80.000.000,- realisasi Rp. 38.500.000,- atau 48,13%.
23. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca tidak dilaksanakan karna di hapus pada saat pergeseran anggaran.
24. Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dengan target 50 dokumen terealisasi sebanyak 25 dokumen atau 50%, pagu sebesar Rp. 45.400.000,- realisasi Rp. 36.943.000 atau 81,37%.
25. Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dengan target 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%, pagu sebesar Rp. 65.081.000,- realisasi Rp. 58.175.900 atau 89,39%.

26. Kegiatan lomba lembaga kearsipan terbaik dengan target 5 lembaga terealisasi sebanyak 4 lembaga atau 80%, pagu sebesar Rp. 47.856.000,- realisasi Rp. 41.188.652,- atau 86,07%.
27. Kegiatan workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta dengan target 50 orang terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%, pagu sebesar Rp. 96.300.000,- realisasi Rp. 73.239.130,- atau 76,05%.
28. Kegiatan pelaksanaan pameran perpustakaan dan kearsipan tidak dilaksanakan karna di hapus pada saat pergeseran anggaran.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang pencapaian kinerja;
3. Adanya perubahan anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas;
4. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir;
4. Perencanaan serta pengambilan kebijakan dalam menentukan target program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada *Tabel 2.1.(terlampir)*.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat berdasarkan *Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (terlampir)*.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan isu-isu strategis yang berkembang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja serta mempengaruhi perencanaan pembangunan dalam peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - Kuantitas dan kualitas SDM Aparatur masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - Belum memiliki gedung layanan perpustakaan.
 - Belum memiliki kantor.
3. Sistem Pengelolaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - Sistem informasi manajemen perpustakaan dan arsip belum optimal.
4. Pengelolaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - Penyediaan bahan bacaan belum dilaksanakan secara optimal.

- Kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan belum berjalan secara optimal.
 - Upaya pengembangan koleksi deposit belum optimal.
 - Penelusuran arsip belum dilaksanakan secara optimal.
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan kearsipan belum berjalan secara optimal.
 - Upaya penyelamatan Arsip Statis belum ada.
 - Pengembangan khasanah Kearsipan belum optimal.
5. Minat baca dan Gemar Membaca masyarakat masih rendah.
 6. Apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan masih rendah.
 7. Indeks literasi masyarakat masih rendah.

Melihat isu-isu penting yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan didapat hubungan antara isu-isu tersebut dengan program dan kegiatan yang telah disusun. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum bisa berbuat banyak dengan berbagai kendala yang di uraikan sebelumnya. Kondisi ini tentunya harus dicarikan solusi cepat agar Organisasi dapat dengan cepat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan titik awal dari upaya untuk mempersiapkan dan melaksanakan rumusan-rumusan sesuai hasil Musyawarah provinsi Pertama Tahun 2017 dan Rapat Kerja (Raker) tentang Program Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dari RPJMD selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat program kerja Organisasi selama 5 tahun. Rincian program yang dilaksanakan dituangkan pada Renja Organisasi pada tahun berjalan setiap tahun selama 5 tahun.

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian urusan wajib pemerintah yang turut mempengaruhi rencana pembangunan yang cita-citakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk tahun 2017-2021. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara pada Misi pertama “Madiri” dengan tujuan Mencerdaskan kehidupan masyarakat Kalimantan Utara dan Misi ketiga “Bersih dan Berwibawa” dengan tujuan menciptakan akuntabilitas

publik. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan organisasi ini dibutuhkan dalam upaya melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk melihat lebih jelas review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 dapat dilihat *pada tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara (terlampir).*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempersiapkan program dan kegiatan yang merupakan upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang pelayanan masyarakat. Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan perencanaan dan membuka saluran informasi dengan berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang didalam berbagai tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelaahan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun 2020.

Usulan-usulan program dan kegiatan itu sendiri didapatkan dari :

1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan Rapat Koordinasi, didapatkan usulan-usulan perencanaan pembangunan dari berbagai pihak baik dari Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota maupun unit OPD, dan juga Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga Pembina Perpustakaan maupun Kearsipan di Daerah. Usulan ini kemudian ditampung untuk didiskusikan lebih lanjut dalam proses perencanaan di internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Proses perencanaan internal dilakukan dengan melibatkan seluruh kekuatan organisasi Mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bidang yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara. Proses ini dilakukan dengan merujuk kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017 – 2021 serta dengan memperhatikan program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Proses ini juga didasarkan pada data hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun sebelumnya.
3. Penyusunan Draft Usulan Program dan Kegiatan Proses perencanaan internal ini kemudian digabungkan dengan hasil dari Musyawarah Provinsi

dan Rapat Koordinasi untuk kemudian disusun sebagai draft usulan program dan kegiatan tahun 2020.

4. Hasil perencanaan yang sudah dilakukan yaitu hasil dari Musrenbang kabupaten/kota dan perencanaan internal kemudian dibawa ke forum Musrenbang Provinsi untuk dilakukan sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2019 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Pelayanan Surat keluar masuk	360 Lembar	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Luas Kantor yang Dibersihkan	12 Bulan	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis ATK yang Disediakan	12 Bulan	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	5 Jenis	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan	5 Jenis	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah/Porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat, Tamu, Kegiatan DLL	1640 Porsi	

12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dilakukan	60 Kali	
13	Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang Dilakukan	80 Kali	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
14	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah Unit yang Disewa	1 Unit	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	5 Unit	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	5 Jenis	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	17 Orang	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				
18	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Tersedia	60.000 Eksemplar	
19	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Dalam Provinsi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	60 Orang	
20	Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Dalam Provinsi	Jumlah Perpustakaan Umum, Masyarakat, Desa dan Sekolah yang Dibina	8 Perpus	
21	Pengembangan Perpustakaan Digital	Tanjung Selor	Jumlah Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan yang Dikelola	1 Aplikasi	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				
22	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Arsip yang Diduplikasi	50 Dokumen/ Arsip	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				
23	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	50 Orang	
24	Workshop Perpustakaan dan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tarakan	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	40 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Rencana Strategi PNRI

Visi PNRI adalah: “Terdepan dalam Informasi Pustaka, Menuju Indonesia Gemar Membaca”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi-misi oleh PNRI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koleksi perpustakaan di Indonesia
2. Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mengembangkan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan telaahan visi dan misi tersebut yang terkait dengan dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara adalah misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan koleksi perpustakaan di Indonesia

Misi ini telah didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan pengadaan bahan bacaan sebagai koleksi perpustakaan.

2. Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ini telah didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis TIK. Perpustakaan yang akan dibangun merupakan pusat informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk wilayah utara Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mensinergikan program kegiatan melalui pemberian bantuan/stimulan berupa sarana perpustakaan kepada pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan supervisi, monitoring dan stimulasi pada Perpustakaan Umum,

Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

3. Mengembangkan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia.

Misi tersebut juga mendukung visi dan misi-nya pemerintah dengan membangun dari daerah pinggiran (perbatasan) karena Kaltara terletak di perbatasan. Misi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program pengembangan infrastruktur melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan gedung layanan.

B. Telaahan Rencana Strategis ANRI

Visi ANRI adalah: “Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai Pada Tahun 2025”. Misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut oleh ANRI adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai perauran perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu: **“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**. Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.**
2. **Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.**
3. **Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.**

Berdasarkan telaahan visi dan misi tersebut, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan urusan wajib Pemerintah yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 terkait langsung dengan Misi 1., yaitu: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Strategi 1: Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS. Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan PMKS.
- Strategi 3: Peningkatan pelayanan pendidikan. Arah Kebijakan: Meningkatkan minat baca.
- Strategi 7: Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Arah Kebijakan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dan kapasitas kelembagaan pertanian.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang Misi 1 tersebut adalah **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**. Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan meliputi sebagai berikut:

- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- Rasio perpustakaan persatuan penduduk
- Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

- Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dan
 - Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.
- Indikator-indikator kinerja tersebut diakomodir dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi target capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2021.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 terkait langsung dengan Misi 3, yaitu: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Adapun Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Strategi 15: Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Arah Kebijakan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- Strategi 17: Peningkatan sistem pelayanan yang prima dengan Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan. Sasaran ingin dicapai adalah Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang Misi 3. tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Pengukuran Program-Program untuk Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Jumlah SDM pengelola kearsipan. Indikator-indikator kinerja tersebut diakomodir dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi target capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2021.

Hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi dapat dilihat pada *Tabel 3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi (terlampir)*.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mencapai visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

4.1.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Daftar Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Kode		Uraian
Prog	Keg	
1	2	3
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah
	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	01	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan
	02	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara
	03	Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
	08	Pengembangan Perpustakaan Digital
16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	03	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah
18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	03	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
	07	Workshop Perpustakaan dan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

4.1.3. Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada table 4.2 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalamnya menggambarkan skala prioritas pembangunan. Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan adalah hal yang sangat penting selain upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui minat baca yang tinggi, tapi juga yang teramat penting adalah penyelamatan arsip adalah bagian yang harus disikapi dengan serius sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2018 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran organisasi. Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan, profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanat yang dipundakkan padanya. Hanya dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, tugas Negara dapat dilaksanakan dengan ichlas, dalam keadaan sadar dan penuh semangat. Dan seluruh pegelutan kita hanya akan actual jika melakukan pengarsipan dengan benar. Ingat Indonesia akan tetap lestari jika dokumen arsipnya dibuat dan dijaga secara turun temurun.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
Periode Triwulan IV Tahun 2018

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018						Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		
													Target Renja PD Tahun 2018		Realisasi Renja PD Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	Rp	Rp	
1							2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
17	2	17	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran					2.821.294.377		2.115.690.387		75		1.924.013.966	6.629.205.473			
17	2	17	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di kirim	1.800	lembar	40.000.000	193	6.503.050	360	10.000.000	290	8.416.000	80,56	84,16	360	10.000.000	24.919.050,00	0,62
17	2	17	01	01	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran satu tahun	60	bulan	580.000.000	12	97.802.797	12	121.500.000	12	110.186.564	100,00	90,69	12	181.900.000	389.889.361,00	0,67
17	2	17	01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	9	unit	20.000.000			3	15.000.000	3	3.802.000	100,00	25,35	5	18.750.000	22.552.000,00	1,13
17	2	17	01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi dinas perpustakaan dan kearipan yang mendapat honorarium	60	bulan	2.428.800.000	12	494.584.286	12	642.500.000	12	462.847.400	100,00	72,04	12	709.502.500	1.666.934.186,00	0,69
17	2	17	01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang tersedia	10	jenis	240.000.000	10	55.484.850	10	54.000.000	10	43.188.430	100,00	79,98	10	57.000.000	155.673.280,00	0,65
17	2	17	01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	10	jenis	760.000.000	10	199.100.000	10	150.000.000	7	134.233.845	70,00	89,49	10	153.450.000	486.783.845,00	0,64
17	2	17	01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan berkas yang digandakan	10	jenis	240.000.000	10	34.112.400	10	60.000.000	6	57.897.700	60,00	96,50	10	60.000.000	152.010.100,00	0,63
17	2	17	01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	10	jenis	120.000.000	10	16.686.000	10	15.000.000	9	7.538.000	90,00	50,25	10	30.000.000	54.224.000,00	0,45

17	2	17	01	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10	jenis	470.000.000	10	401.626.600	10	596.250.000	6	197.493.780	60,00	33,12	10	77.000.000	676.120.380,00	1,44
17	2	17	01	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	10	jenis	80.000.000	10	14.999.600	10	23.000.000	10	22.417.700	100,00	97,47	10	10.000.000	47.417.300,00	0,59
17	2	17	01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah/ jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10	jenis	448.000.000			10	40.500.377	8	40.497.000	80,00	99,99	10	40.000.000	80.497.000,00	0,18
17	2	17	01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	8.200	porsi	608.800.000	1620	182.104.000	1.640	120.000.000	1.500	119.597.100	91,46	99,66	1.500	68.000.000	369.701.100,00	0,61
17	2	17	01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat/Perjalanan Dinas yang dilaksanakan/diikuti dalam Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	300	kali	2.400.000.000	60	627.365.214	60	589.500.000	60	523.703.424	100,00	88,84	60	280.000.000	1.431.068.638,00	0,60
17	2	17	01	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah Rapat/Perjalanan Dinas yang dilaksanakan/diikuti dalam Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	400	kali	1.600.000.000	80	459.132.323	80	384.044.000	80	383.871.444	100,00	99,96	80	228.411.466	1.071.415.232,80	0,67
88,00																		79,11	149,93	137.429.568,99	473.514.676,63	0,68	
17	2	17	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyerapan Anggaran Program seiring makin efektifnya pengelolaan anggaran							1.030.180.000		375.723.415		36,47		17.291.897.000	17.725.982.015	
17	2	17	01	01	02	11	Penyewaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	4	unit	800.000.000			1	196.680.000	1	196.680.000	100,00	100,00	1	160.000.000	356.680.000,00	0,45
17	2	17	01	01	02	12	Pembangunan Gedung Kantor SKPD	Jumlah kegiatan pembangunan kantor yang dilaksanakan	2	kali	16.987.897.000			2	740.500.000	1	107.695.000	50,00	14,54	1	16.987.897.000	17.095.592.000,00	1,01
17	2	17	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat	12	unit	80.000.000	8	40.629.600	3	73.000.000	3	63.633.915	100,00	87,17	5	124.000.000	228.263.515,00	2,85
17	2	17	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat	10	unit	90.000.000	10	17.732.000	10	20.000.000	6	7.714.500	60,00	38,57	10	20.000.000	45.446.500,00	0,50
77,50																		60,07		4.322.974.250,00	4.431.495.503,75	1,20	

17	2	17	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya						116.000.000		103.851.323		89,53		56.000.000			
17	2	17	01	01	05	01	Pedidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	16	orang	320.000.000	4	80.252.272	4	116.000.000	4	103.851.323	100,00	89,53	5	56.000.000	240.103.595,00	0,75
100,00																		89,53		56.000.000,00	240.103.595,00	0,75	
17	2	17	01	01	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan						230.325.000		169.417.400		73,56		678.530.000			
17	2	17	01	01	15	02	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Jumlah peserta rakor	240	orang	520.000.000	48	149.695.500	48	93.345.000	48	93.344.400	100,00	100,00	60	241.830.000	484.869.900,00	0,93
17	2	17	01	01	15	03	Pembinaan pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	40	Perpus takaan	320.000.000	4	116.615.658	10	56.980.000	10	37.573.000	100,00	65,94	20	145.600.000	299.788.658,00	0,94
17	2	17	01	01	15	08	Pengembangan perpustakaan digital	Jumlah aplikasi perpustakaan digital yang dikelola	1	aplikas i	450.000.000			1	80.000.000	1	38.500.000	100,00	48,13	1	201.500.000	240.000.000,00	0,53
17	2	17	01	01	15	10	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah Kegiatan Publikasi (lomba) dan sosialisasi minat dan budaya baca	1	kegiata n	360.600.000								1	89.600.000	89.600.000,00	0,25	
100,00																		71,36		169.632.500,00	278.564.639,50	0,88	
17	2	17	01	01	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan						158.337.000		136.307.552		86,09		70.930.000			
17	2	17	01	01	16	03	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang diduplikasi	240	dokum en	140.000.000			50	45.400.000	25	36.943.000	50,00	81,37	50	183.000.000	219.943.000,00	1,57
17	2	17	01	01	16	05	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah dokumen jadwal retensi arsip	2	dokum en	70.300.000			2	65.081.000	2	58.175.900	100,00	89,39	60	75.760.000	133.935.900,00	1,91
17	2	17	01	01	16	08	Lomba Lembaga Kearsipan terbaik	Jumlah lembaga kearsipan Kab/kota se-Kaltara yang mengikuti lomba	5	lemba ga	341.000.000			5	47.856.000	4	41.188.652	80,00	86,07	5	70.930.000	112.118.652,00	0,33
76,67																		85,61		109.896.666,67	155.332.517,33	1,27	

17	2	17	01	01	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase tingkat kepuasan pengguna informasi							96.300.000		73.239.130		76,05		116.000.000		
17	2	17	01	01	18	07	Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta workshop	300	orang	450.000.000			50	96.300.000	50	73.239.130	100,00	76,05	70	124.600.000	197.839.130,00	0,44
17	2	17	01	01	18	08	Pelaksanaan pameran perpustakaan dan kearsipan	Jumlah pengunjung pameran perpustakaan dan kearsipan	3.000	orang	321.748.000			1.000	-	-	-	-		1.000	116.000.000	116.000.000,00	0,36
																		100,00	76,05		120.300.000,00	156.919.565,00	0,80
Realisasi Anggaran															4.452.436.377		2.974.229.207		66,80				
Rata - Rata Capaian Kegiatan																			76,95				

Tanjung Selor, Maret 2019

Disusun
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DR. Ir. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 19630908 198902 1 002

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Kunjungan Perpustakaan											
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan			20%	20%	20%	20%	85%	0	50%	50%	
2	Meningkatnya minat baca masyarakat			10%	10%	20%	20%	90%	0	50%	50%	
3	Terwujudnya Kualitas SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Profesional			20%	20%	20%	20%	100%	0	50%	50%	
	Jumlah Lembaga yang Mengelola Arsip Dinamis dan Statis											
1	Terwujudnya tertib arsip di Pemerintah Daerah			10%	15%	15%	20%	90%	0	50%	50%	

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Pelayanan Surat keluar masuk	360 Lembar	10.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah Pelayanan Surat keluar masuk	360 Lembar	10.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	145.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	145.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	25.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	25.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	607.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	607.200	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Luas Kantor yang Dibersihkan	12 Bulan	60.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	12 Bulan	60.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis ATK yang Disediakan	12 Bulan	190.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis ATK yang disediakan	12 Bulan	190.000	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Jenis	60.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Jenis	60.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	30.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	30.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan	5 Jenis	230.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan	5 Jenis	230.002	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	4.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah/Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	4.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat, Tamu, Kegiatan dan DLL	1640 Porsi	82.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat, Tamu, Kegiatan dan DLL	1640 Porsi	82.000	
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dilakukan	60 Kali	500.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dilakukan	60 Kali	500.000	
13	Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang Dilakukan	80 Kali	400.000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang Dilakukan	80 Kali	400.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
14	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah Unit yang Disewa	1 Unit	80.000	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah Unit yang Disewa	1 Unit	80.000	

15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	5 Unit	145.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	5 Unit	145.000	
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	5 Jenis	30.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	5 Jenis	30.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	100.000	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
18	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Tersedia	2000 Eksemplar	300.000	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Tersedia	2000 Eksemplar	300.000	
19	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan	Dalam Provinsi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan	80 Orang	200.000	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan	Dalam Provinsi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan	80 Orang	200.000	
20	Pembinaan Pada Perpustakaan Umum,Khusus,Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Dalam Provinsi	Jumlah Perpustakaan Umum. Masyarakat, Desa dan Sekolah yang Dibina	8 Perpus	100.000	Pembinaan Pada Perpustakaan Umum,Khusus,Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Dalam Provinsi	Jumlah Perpustakaan Umum. Masyarakat, Desa dan Sekolah yang Dibina	8 Perpus	100.000	
21	Pengembangan Perpustakaan Digital	Tanjung Selor	Jumlah Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan yang Dikelola	1 Aplikasi	250.000	Pengembangan Perpustakaan Digital	Tanjung Selor	Jumlah Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan yang Dikelola	1 Aplikasi	250.000	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah										

22	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Arsip yang Diduplikasi	50 Dokumen/Arsip	75.000	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Arsip yang Diduplikasi	50 Dokumen/Arsip	75.000	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi										
23	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi	50 Orang	100.000	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi	50 Orang	100.000	
24	Workshop Perpustakaan dan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	40 Orang	120.000	Workshop Perpustakaan dan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	40 Orang	120.000	

Tabel 3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

Fokus Pembangunan Nasional Dalam Rantek RPJMN 2020-2025	Fokus Kaltara Dalam Ranwal RKPD 2020	Prioritas Kaltara Dalam Ranwal RKPD 2020	Nama Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP	Nama Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP	Lokasi Kegiatan	Jumlah Indikasi Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemandirian PMKS				
		Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja				
		Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	300.000.000,-
				Pengembangan Perpustakaan Digital	Tanjung Selor	250.000.000,-
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan				
Pembangunan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan				
		Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
		Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi, dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)				
		Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah				
		Peningkatan Daya Tarik Berinvestasi				

		Peningkatan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup				
Pembangunan Kewilayahan	Pembangunan Kewilayahan	Percepatan Pembangunan Desa Secara Terpadu				
		Fasilitasi Perwujudan Wilayah Perbatasan Yang Tertib dan Teneteram				
Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi Dengan Tataruang				
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan	Pembangunan Keamanan, Ketertiban Dan Tata Kelola Pemerintah	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
		Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Terpadu				
		Peningkatan System Pelayanan yang Prima				
		Peningkatan Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Keamanan dan Kebencanaan Secara Terpadu				
			1 Program	2 Kegiatan		

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk	Tanjung Selor	1.000 Lembar	10.000.000,-	PAD		1.000 Lembar	10.000.000,-
01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	12 Bulan	325.000.000,-	PAD		12 Bulan	325.000.000,-
01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tanjung Selor	5 Unit	9.000.000,-	PAD		5 Unit	10.000.000,-
01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	12 Bulan	618.000.000,-	PAD		12 Bulan	765.000.000,-
01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang digunakan	Tanjung Selor	12 Bulan	60.000.000,-	PAD		12 Bulan	60.000.000,-
01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	165.000.000,-	PAD		12 Bulan	190.000.000,-
01	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tanjung Selor	5 Jenis	60.000.000,-	PAD		5 Jenis	60.000.000,-
01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	5 Jenis	30.000.000,-	PAD		5 Jenis	30.000.000,-

01	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	Tanjung Selor	10 jenis	480.000.000,-	PAD		5 jenis	100.000.000,-
01	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah/jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tanjung Selor	5 jenis	4.000.000,-	PAD		5 Jenis	5.000.000,-
01	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah/Porsi Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu, Kegiatan dan DLL	Tanjung Selor	1640 Porsi	82.000.000,-	PAD		1700 Porsi	100.000.000,-
01	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilakukan	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	60 Kali	500.000.000,-	PAD		60 Kali	600.000.000,-
01	01	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang dilakukan	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara	80 Kali	400.000.000,-	PAD		80 Kali	500.000.000,-
17	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
01	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit yang disewa	Tanjung Selor	1 Unit	80.000.000,-	PAD			
01	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tanjung Selor	5 Unit	145.000.000,-	PAD		5 Unit	145.000.000,-
01	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Tanjung Selor	5 Jenis	30.000.000,-	PAD		5 Jenis	30.000.000,-
17	01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
01	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	17 Orang	150.000.000,-	PAD		8 Orang	100.000.000,-

17	01	01	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
01	01	15	01	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Tersedia	Tanjung Selor	60.000 Eksemplar	161.352.426,-	PAD		1.500 Eksemplar	255.000.000,-
01	01	15	02	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Dalam Provinsi	80 Orang	306.400.000,-	PAD		80 Orang	310.000.000,-
01	01	15	03	Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Umum. Masyarakat, Desa dan Sekolah yang dibina	Dalam Provinsi	8 Perpustakaan	324.400.000,-	PAD		8 Perpustakaan	350.000.000,-
01	01	15	08	Pengembangan Perpustakaan Digital	Jumlah Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan yang dikelola	Tanjung Selor	1 Aplikasi	250.000.000,-	PAD		1 Aplikasi	250.000.000,-
01	01	15	12	Bimbingan Teknis Perpustakaan Berbasis IT	Jumlah Perpustakaan yang di Bimbing	Tanjung Selor	30 Perpustakaan	175.450.000,-	PAD		50 Perpustakaan	430.000.000,-
17	01	01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								
01	01	16	03	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen Arsip yang diduplikasi	Tanjung Selor	50 Dokumen/ Arsip	160.000.000,-	PAD		50 Dokumen/ Arsip	160.000.000,-
17	01	01	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
01	01	18	03	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tanjung Selor	50 Orang	209.150.000,-	PAD		50 Orang	200.000.000,-

01	01	18	07	Workshop Perpustakaan dan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	Tanjung Selor	40 Orang	345.250.000,-	PAD		40 Orang	345.000.000,-
----	----	----	----	---	--	---------------	----------	---------------	-----	--	----------	---------------